



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698

E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id

TARAKAN (77121)

**GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
TA 2025**

Perangkat Daerah	2.14. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kinerja	Terwujudnya Peningkatan Penggunaan MKJP
Indikator	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Satuan	1.429 orang
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan4. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	<p>Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan</p>

kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. Capaian Kinerja *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2023 sebesar 2.28 lebih rendah 0.06 poin dari target 2.24. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Capaian sebesar 2.28 menunjukkan bahwa di Kota Tarakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya adalah 2 anak. Untuk Tahun 2025 DPPPAPPKB Kota Tarakan menetapkan target TFR sebesar 2.26 karena pergerakan angka diperkirakan masih tetap diangka 2.28 sesuai Rensta DPPKB Tahun 2025-2030.

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan:

1. Akses :

a. Aksesibilitas akseptor dalam meningkatkan wawasan mengenai metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada terbatas.

2. Partisipasi

a. Partisipasi akseptor dalam mendapatkan Pengetahuan MKJP belum optimal

b. Partisipasi akseptor pria dalam keikutsertaan pelayanan menggunakan MKJP masih rendah

3. Kontrol

a. Kewenangan dalam mendapatkan pengambilan keputusan dalam penggunaan MKJP masih rendah.

4. Manfaat :

a. Belum semua akseptor mendapatkan manfaat dari penggunaan MKJP.

5. Stereotipe : Adanya pelabelan bahwa perempuan yang harus menggunakan alat kontrasepsi

6. Budaya: Stigma sosial terhadap pemakaian kontrasepsi atau budaya yang mendukung peran tradisional gender dalam pengendalian kelahiran bisa menjadi penghalang bagi akseptor untuk menggunakan kontrasepsi.

b. Sebab Kesenjangan Internal

1. SDM : Petugas Penyuluh KB (PKB) yang seharusnya 1 PKB mengampu 1 Kelurahan, sedangkan di Kota Tarakan PKB bisa 2-3 kelurahan.

2. Regulasi : tidak adanya perda yang mengatur tentang MKJP

3. Data : Sebagian data OPD belum responsive gender, pemahaman internal OPD terhadap perhitungan data outcome pencapaian KB masih rendah dan sangat tergantung pada BKKBN.

	<p>4. Mekanisme koordinasi internal dan lintas OPD : Koordinasi antar OPD dalam PUG belum optimal</p> <p>c. Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <p>1. Kurangnya kesadaran tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia bagi akseptor serta kurangnya pengetahuan tentang cara kerja, efektivitas dan efek sampingnya</p> <p>2. Masih adanya stigma sosial terhadap pemakaian kontrasepsi atau budaya yang mendukung peran tradisional gender dalam pengendalian kelahiran bisa menjadi penghalang bagi akseptor untuk menggunakan kontrasepsi.</p>
B. Penerima Manfaat	1.429 orang masyarakat yang mau ber-KB (akseptor)
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Melakukan Sosialisasi terkait metode kontrasepsi untuk akseptor
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi 2. Melakukan pendekatan dan pendataan terhadap calon akseptor 3. Tindak lanjut pelaksanaan MKJP
3. Tolak Ukur	Meningkatkan pelayanan jumlah akseptor yang ber-KB dan menekan angka unmet need
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 10 bulan
E. Biaya yang diperlukan	476.724.000 (Empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Tarakan, 17-11-2025
Penanggung jawab



Hadriana, S.ST, Ns.
Penata Tingkat I
Nip. 197205042001122006